

## **ABSTRAK**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Disini penulis memberikan informasi bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang baik, dalam hal ini yang terjadi di Kabupaten Rembang. Rembang juga diberi kekuasaan untuk melaksanakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, Rembang juga berhak mengatur jalannya pemerintahan sendiri kota tersebut, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah kota Rembang. Dengan demikian perlu adanya pengelolaan keuangan daerah yang bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga pemerataan pembangunan bisa tercapai dan tepat sasaran.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data utama terdiri dari lokasi penelitian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Rembang, sedangkan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, dokumen dan wawancara. Adapun pendekatannya memakai pendekatan Yuridis Sosiologis, serta menggunakan metode analisis data Analisis Deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah pengelolaan yang dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harus transparan, Akuntabel sesuai dengan undang-undang atau peraturan Perundangan yang berlaku, pengelolaan maupun pemeriksaan keuangan daerah yang baik akan dapat meningkatkan akuntabilitas terhadap pemerintahan daerah dengan ditandainya kemajuan daerah tersebut. Perbaikan-perbaikan terhadap Pemeriksaan Keuangan Daerah dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Rembang Secara umum adalah Meningkatkan sistem pengendalian intern, selalu menindaklanjuti temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi, meningkatkan fungsi pengawasan DPRD maupun Masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan.

Pemerintah Daerah Kab. Rembang diharapakan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan akuntabilitas publik dalam keseluruhan rangkaian pembuatan APBD, serta membuka peran serta masyarakat seluas-luasnya melalui perumusan, penetapan dan implementasi APBD yang demokratis.

### **Kata kunci**

Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas

## ABSTRACT

*Regional Financial Management is a subsystem from State Financial Management System and is an essential element on Implementation of Local Government. The author provides information about How the Good Financial Management, which occurred in Rembang. Rembang also given the power to carry out the review of local autonomy. In the Regional Autonomy Implementation, Rembang also Self-Governing entitled to set the course of the city, including the Financial Management on Rembang city. Therefore, to need for Financial Management which justified its use so that equitable development can be achieved and the right target.*

*The type of data used are primary data and secondary data. Primary data is the main data consisting of research Department of Revenue , Finance and Asset Management and Inspektorat of Rembang, the secondary data consist of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. This research is descriptive analysis and includes Field Research type (fieldwork). The data collection methodcusing observation techniques, documents and interviews. The sociological approach to wear juridical approach, as well as use of data analysis methods Descriptive Analysis.*

*The results showed that the financial management area is a good management in terms of planning , implementation , administration , reporting , accountability , and oversight must be transparent , accountable in accordance with the laws or regulations of legislation in force , management and financial audit areas that will either can enhance the accountability of the local government marked a progress of the region. Improvements to the Regional Audit in order to enhance the accountability of Government Operation in Rembang general is Improving the internal control system , always follow up on the findings of the examination according to the recommendations , improving the oversight function of Parliament and the public , and financial management capacity building .*

*Finally we hope full light Rembang district can improve the quality of human resources and develop public accountability in the whole series of budget –making, and open participation of the broadest community through the formulation, the establishment and implementation of a democratic budget .*

**Keywords**

*Investigation, Financial Management, Accountability*